

Pengaruh *Political Connection* dan *Managerial Ownership* terhadap *Tax Aggressiveness*

Firma Ayu Diafitri^{1*}, Herlina Helmy²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: Firmaayudiafitri97@gmail.com

Tanggal Masuk:

6 Juni 2023

Tanggal Revisi:

20 Oktober 2023

Tanggal Diterima:

11 November 2023

Keywords: *Managerial Ownership; Political Connection; Tax Aggressiveness.*

How to cite (APA 6th style)

Diafitri, F.A., & Helmy, Herlina. (2023). Pengaruh *Political Connection* dan *Managerial Ownership* terhadap *Tax Aggressiveness*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (4), 1674-1689.

Abstract

The aim of this research is to examine effect of political connection and managerial ownership on tax aggressiveness in primary consumer goods manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange 2019-2021. The type of this research is causative research, with purposive sampling technique, it got 38 companies as sample. The researcher applied multiple regression analysis. While, the result showed that a political connection had significant and positive effects on tax aggressiveness, while managerial ownership had not significant effects on tax aggressiveness.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.911>



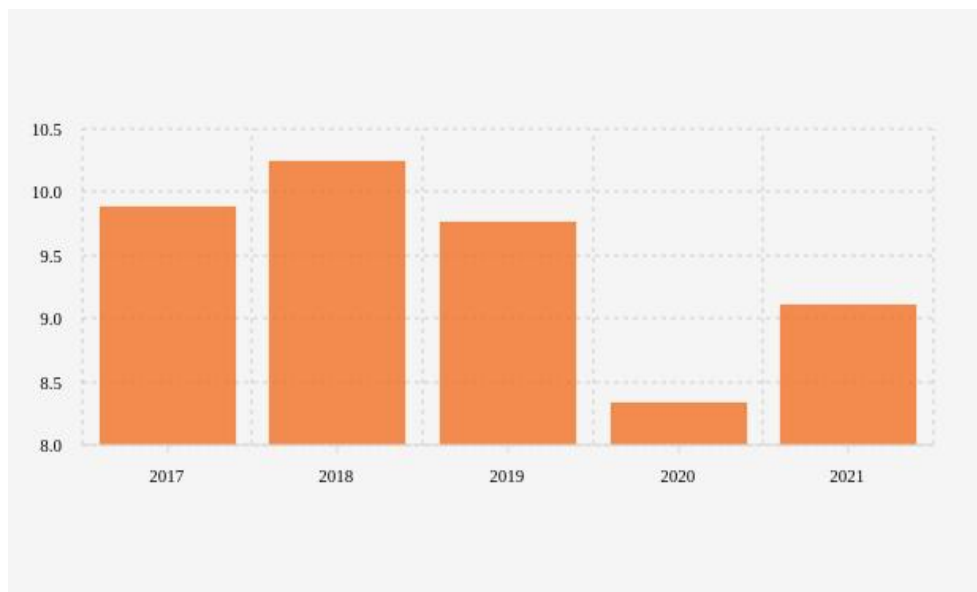
This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pengeluaran signifikan dalam bidang bisnis serta secara langsung dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai pemegang saham. Manajemen menggunakan berbagai macam cara untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Adapun berbagai cara yang dapat dilakukan oleh manajemen dalam rangka menghindari pajak dengan cara agresivitas pajak. Frank *et al.*(2009) berpendapat agresivitas pajak sebagai praktik manipulasi pendapatan kena pajak perusahaan dengan merencanakan adanya pajak legal dan illegal yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Zuber & Sanders (2013) mengatakan bahwa terdapat “area abu-abu” di mana agresivitas pajak dapat terjadi. Perusahaan memanfaatkan “area abu-abu” tersebut, untuk meminimalisir beban pajak, baik yang mematuhi undang-undang maupun yang melanggarnya.

Aktivitas agresivitas pajak merupakan aktivitas yang umum dalam bisnis secara global. Seperti yang dilakukan perusahaan teknologi di Amerika serikat yaitu Google. Google menghemat pajak senilai 19.9 M Euro atau sebesar (US\$22,7 miliar atau 327 triliun rupiah) dengan menghindari pajak Bermuda melalui perusahaan cangkang Belanda pada 2017. Google melakukan ini, untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri (Sebayang 2019).

Selain di bisnis secara global, praktik pehindaran pajak kerap terjadi di Indonesia seperti yang dilaksanakan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan menerapkan *transfer pricing* pada tahun 2019. Perusahaan ini beroperasi di industri pertambangan di Indonesia. Merujuk pada laporan *Global Witness* yang bertajuk *Taxing Time for Adaro*. PT terkait melakukan pengalihan keuntungan dari penambangan batubara yang berada di Indonesia ke lokasi bebas pajak di Singapura, melalui anak perusahaan yang dalam hal ini adalah *Coaltrade Services International*. Hal demikian ini dilaksanakan untuk meminimalisir tagihan pajak. PT terkait mampu meminimalisir tagihan mereka hingga USD 14 juta. Sehingga hal tersebut menjadikan mereka harus membayar pajak senilai USD 125 juta, dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar. (Wareza 2019). Merujuk pada fenomena tersebut, maka dapat dipahami bahwa agresivitas pajak sering kali dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1 tax ratio Indonesia.



Sumber: Kemenkeu (2022)

Gambar 1
Tax Ratio Indonesia Tahun 2017-2021

Banyaknya perusahaan melakukan agresivitas mengakibatkan rendahnya rasio pajak Indonesia. Rasio pajak mendeskripsikan kepatuhan warga Negara dalam membayar pajaknya. Rasio ini juga menjelaskan kemampuan administrasi pajak dalam menghimpun pajak dari pihak wajib pajak. Merujuk pada data dari OECD, rasio pajak Indonesia tercatat sejak 2021 senilai 9.1 %. Angka tersebut sangat rendah yang diketahui dari banyaknya potensi pajak yang tidak dibayarkan. rasio pajak Indonesia ini tampak jelas jika dibandingkan dengan rasio pajak beberapa Negara ASEAN yang lain. Misalnya Malaysia memiliki rasio pajak 11,4% pada tahun 2021, Singapura memiliki rasio pajak 12,8% pada tahun 2021, Thailand memiliki rasio pajak 16,5% pada tahun 2021, Filipina memiliki rasio pajak 17,8% pada tahun 2021 dan Vietnam memiliki rasio pajak 22,7% pada tahun 2021. Adapun penyebab utama dari rendahnya rasio pajak Indonesia dikarenakan perilaku pihak perusahaan yang sering mengaresivitasikan pajak. (Wahyudi 2015).

Agresivitas pajak menjadi cara dari pihak perusahaan dalam meminimalisir pembayaran pajak. Bagi mereka, biaya adalah beban yang dapat mengurangi keuntungan yang dimiliki. Oleh sebab itu, manajemen melaksanakan berbagai upaya dalam meminimalkan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, bagi pihak pemerintah, pajak adalah sumber

pendapatan Negara yang dimanfaatkan untuk mendanainya proses pembangunan. Sebagai akibatnya, pemerintah tidak ingin perusahaan agresif dengan pajak mereka. Merujuk pada teori keagenan, tampak jelas bahwa pihak pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan ketidaktaatan perusahaan kepada pemerintah dengan mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perusahaan sering melakukan agresivitas pajak perusahaan, seperti koneksi politik dan kepemilikan manajerial. Kim & Zhang (2016) dan Wicaksono (2017) menjelaskan bahwa secara umum agresivitas pajak dilakukan oleh pihak perusahaan dengan koneksi politik yang baik. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hartadinata dan Tjaraka (2013) dan Hadi dan Mangoting (2014) berpendapat bahwa kepemilikan manajerial menjadi faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh koneksi politik. Sehingga perusahaan terkait memilih berbagai pihak dari partai politik untuk duduk di dewan direksi dan komisaris mereka (Faccio 2006). Negara berkembang melakukan koneksi politik dengan mengangkat dewan direksi dan komisaris dekat dengan pemerintah sehingga perusahaan tersebut dapat terkoneksi dengan perusahaan (Fisman 2001). Indonesia adalah salah satu negara tersebut. Di samping itu, Hidayati & Diyanty (2018) menemukan bahwa mayoritas perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menjalin hubungan informal dengan pemerintah atau partai politik. Maka dengan koneksi politik tersebut dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Selanjutnya, kepemilikan manajerial memberikan pengaruh pada agresivitas pajak. Dimana hal ini merupakan adanya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Sebagai akibatnya, manajer memainkan peranan sebagai manajer perusahaan maupun sebagai pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan cara dalam pengendalian internal yang berfungsi sebagai pengawas dalam mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan terkait (Sintyawati and Made 2018). Praktik agresivitas pajak perusahaan akan mengakibatkan konflik keagenan, sebagaimana yang diasumsikan dalam teori keagenan relasi antara manajer dan pemegang saham. Praktik agresivitas pajak akan menimbulkan banyak masalah keagenan karena pemegang saham ingin kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang sehingga tidak menginginkan perusahaan terkena masalah perpajakan, sedangkan manajemen ingin meningkatkan kompensasi melalui laba tinggi. Kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat berperan sebagai penengah dalam masalah keagenan antara pihak manajer dengan pemegang saham.

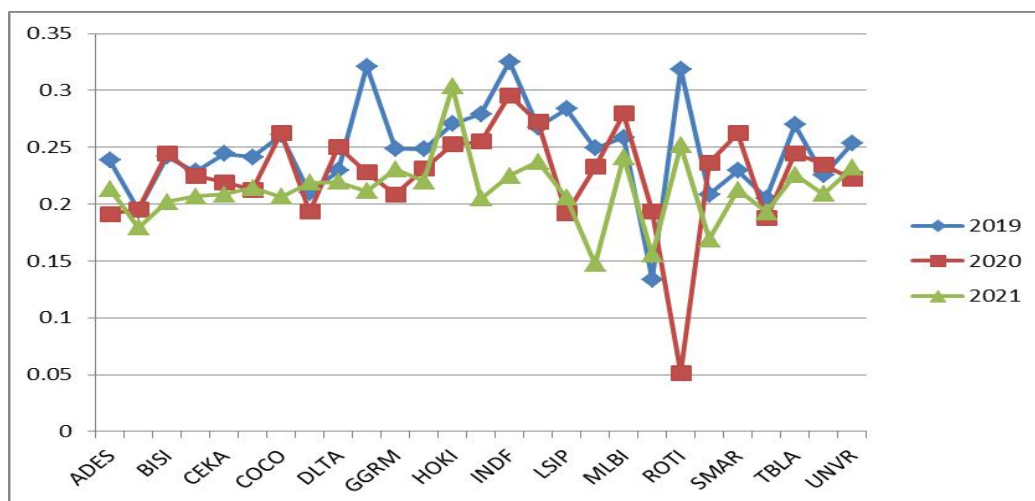
Kepemilikan manajerial memiliki potensi untuk menghilangkan masalah keagenan. Apabila manajemen sebagai pemegang saham, maka tidak terdapat masalah kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh manajemen mempunyai dua kepentingan yakni pemilik perusahaan dan menjalankan usaha. Masalah asimetri informasi dapat dihilangkan apabila manajer yang juga berperan sebagai pemegang saham karena kepemilikan oleh manajemen akan menyelaraskan tujuan antara pemegang saham dengan manajemen (Tania et al. 2018).

Agresivitas pajak yang berlangsung tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Penelitian tentang sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak sering dilakukan. Hal demikian ini selaras dengan hasil penelitian dari Kim & Zhang (2016) dan Wicaksono (2017) mereka menjelaskan bahwasannya variabel koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal demikian ini berbanding dengan penelitian oleh Iswari et al. (2019) yang menyebutkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, Novitasari (2017) & Hadi & Mangoting (2014) menambahkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh kepada agresivitas pajak. Dimana hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang diselesaikan oleh Atari *et al.*

(2016) yang menjelaskan bahwasannya variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dari penelitian relevan yang dikaji maka dapat dipahami bahwa terdapat banyak perbedaan hasil dari masing-masing penelitian dan terdapat banyak kasus yang sebelumnya dijabarkan pada bagian latar belakang tentang agresivitas pajak yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian kembali dengan tentang agresivitas pajak dengan mengkaji faktor koneksi politik dan kepemilikan manajerial yang terdapat di perusahaan. Dalam penelitiannya, peneliti menerapkan penelitian yang diselesaikan oleh Ying *et al.* (2016) sebagai rujukan dengan tambahan variabel independen yaitu koneksi politik yang mengacu pada penelitian Kim & Zhang (2016). *Reaserch gap* dalam penelitian ini yaitu pengukuran koneksi politik menggunakan indeks koneksi politik yang mengakomodir kualitas diri politisi dengan memasukkan tingkat jabatan pada pemerintahan dan partai.

Penelitian ini fokus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan Sektor barang konsumsi primer merupakan salah satu sektor manufaktur unggulan di Indonesia, bahkan di masa pandemi Covid 19. (Tinjau and Sudjiman 2016). Perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang cukup besar. Suatu perusahaan yang besar pasti menghasilkan laba yang besar juga, oleh karena itu akan ada kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dapat terlihat melalui nilai *Effective Tax Rates* (ETR) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Tahun 2019-2021 yang terdaftar di Burdsa Efek Indonesia. Dimana pengukuran ETR dilakukan dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan besar pendapatan bersih untuk menjelaskan seberapa baiknya perusahaan mampu mengelola beban pajak. Agresivitas pajak berbanding terbalik dengan total ETR perusahaan. Dimana semakin besar agresivitas pajak, maka akan semakin rendah total ETR yang dimiliki. Total ETR yang rendah menjelaskan bahwa total beban pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak.



Sumber : Laporan tahunan perusahaan

Gambar 2

Trend Nilai ETR Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Tahun 2019-2021

Pada Gambar 2 terlihat bahwa nilai rata-rata ETR pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer periode 2019-2021 mengalami penurunan. Terbukti pada tahun 2019 rata-rata nilai ETR sebesar 0,247. Pada tahun 2020 menurun menjadi 0,224 dan kembali

mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,212. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan agresivitas pajak paling banyak terjadi pada tahun 2021, yang mana dapat dilihat dari rendahnya rata-rata nilai ETR pada tahun tersebut yaitu sebesar 0,212. Hal ini menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer kemungkinan besar melakukan kegiatan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*).

Pemilihan periode 2019-2021 disebabkan oleh beberapa hal yakni dimulai sejak tahun 2019 adanya wabah pandemi Covid-19 telah berdampak pada stabilitas ekonomi dan penerimaan negara. Kemudian pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 Terkait Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Covid-19. Pemberian insentif pajak tersebut sebagai respons dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha, yang kemudian diperpanjang hingga tahun 2021 dengan PMK No. 82/PMK.03/2021. Selain itu pemilihan tahun 2019-2021 karena menggambarkan kondisi yang relatif baru di bidang perpajakan. Dilihat dari ketersediaan dan kelengkapan data penelitian, periode ini dapat dikatakan periode terkini yang datanya dapat diakses lebih mudah serta lengkap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koneksi politik dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pemerintah lebih agresif dalam melacak setiap perusahaan yang melaksanakan agresivitas pajak. Tingginya kasus agresivitas pajak yang terjadi akan berdampak pada menurunnya rasio pajak dan penerimaan negara.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling pertama kali memperkenalkan teori ini pada 1976 dengan menjelaskan bahwa relasi yang terjalin antara (*agent*) dengan (*principle*). Hubungan keagenan muncul pada saat pemegang saham memperkerjakan orang lain untuk memberikan sejumlah keuntungan kepada mereka lalu memberikan posisi dinamis untuk mereka. Menurut teori keagenan, perusahaan berfungsi sebagai tempat pertemuan antara manajemen dengan pemegang saham. Manajer dituntut untuk mampu mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin, sehingga manajer menuntut kompensasi dari pemegang saham sesuai dengan keinginan manajer karena memikul tanggung jawab yang signifikan.

Masalah keagenan dapat muncul sebagai akibat dari asimetri informasi. Pihak pemegang saham tidak mempunyai informasi cukup yang berkenaan dengan kinerja manajerial yang kemudian dapat menyebabkan masalah keagenan. Selanjutnya, pihak manajer yang mempunyai banyak informasi terkait perusahaan secara keseluruhan tentang lingkungan kerja serta kapasitas diri. Tentunya hal ini menyebabkan adanya ketimpangan informasi yang dimiliki oleh pihak manajer maupun pihak pemegang saham. (Sarra, 2017). Perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh tindakan manajer tidak dapat dipantau secara langsung dan efektif oleh pemegang saham. Akibatnya, terjadi asimetri informasi karena pihak pemegang saham tidak memiliki informasi tentang perusahaan secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kontrak kerja yang efektif dengan tujuan agar tidak terdapat rahasia antara manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya asimetri informasi ini dapat meminimalisir tingkat kesejahteraan pemegang saham dan menaikkan biaya untuk mengatasi permasalahan keagenan.

Pajak (*Tax*)

Dari perspektif ekonomi, pajak merupakan kegiatan yang berisi pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Dua keadaan yang berubah dijabarkan dalam pengertian ini, *pertama*, berkurangnya kapasitas seorang individu untuk mengelola sumber

daya produksi barang maupun jasa. *Kedua*, memperluas kapasitas Negara untuk menyediakan jasa maupun produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pajak biasanya diartikan sebagai kontribusi yang dilakukan oleh individu kepada negara, memaksa individu untuk membayarnya tanpa menerima kompensasi langsung. Otoritas negara mengenakan pajak selaras dengan syarat hukum untuk mendanai produksi barang dan jasa bagi kepentingan umum.

Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Frank *et al.* (2009) menyebutkan agresivitas pajak sebagai tindakan yang disusun untuk meminimalisir penghasilan kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik melalui penghindaran pajak yang bersifat legal, dan penggelapan yang bersifat illegal. Strategi penghindaran pajak yang bersifat aman dan legal yang tidak bertentangan dengan regulasi pajak serta menjelaskan informasi sepenuhnya kepada otoritas pajak merupakan pengertian dari agresivitas pajak. Dengan memanfaatkan “wilayah abu-abu” (*gray area*) dalam regulasi UU perpajakan tersebut tanpa harus melanggarnya (Wicaksono 2017). Hal ini menegaskan bahwa definisi agresivitas pajak adalah memanfaatkan pengurangan pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Koneksi Politik (*Political Connection*)

Koneksi politik adalah kondisi dimana terdapat relasi antara pihak tertentu dengan relasi koneksi politik yang digunakan untuk mencapai banyak hal yang memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak yang digunakan untuk mencapai keuntungan. Koneksi politik dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk yang terkait dengan perpajakan perusahaan. Menurut Faccio (2006), direksi perusahaan, pemegang saham, dan/atau manajemen dengan kedekatan bersama pihak yang terlibat aktif dalam pemerintahan yang dianggap mempunyai koneksi politik.

Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang dijelaskan secara aktif dapat memberikan partisipasi dalam menetapkan keputusan perusahaan. Selain itu, kepemilikan ini dapat ditandai dengan adanya kepemilikan atas saham oleh seorang individu yang terlibat didalamnya. Semakin besar jumlah saham dari manajemen, maka mereka akan lebih aktif dalam memperhatikan kepentingan pihak pemegang saham dan meminimalisir risiko yang akan dihadapi perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajemen melalui saham yang ditanamkan dalam perusahaan, akan menanggung akibat dari keputusan yang sebelumnya diputuskan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Koneksi Politik pada Agresivitas Pajak

Relasi yang ada antara perusahaan dengan pemerintah berhubungan erat dengan koneksi politik. Hal demikian ini dijelaskan bahwa terdapat politisi yang juga berprofesi sebagai pimpinan perusahaan. Koneksi politik berfungsi sebagai jembatan bagi pihak perusahaan untuk dapat dipahami dengan cara menganalisis direksi serta dewan komisaris dengan riwayat keterlibatan baik sebagai seorang parlemen, menteri, pejabat pemerintahan yang berhubungan baik dengan partai politik (Faccio 2006).

Menurut teori keagenan, *principal* dan *agent* adalah pihak yang ingin memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dimana perusahaan menerapkan koneksi politik untuk menghindari pajak secara agresif. Di sisi lain, pemerintah menghendaki kontribusi yang signifikan dari sektor perpajakan, yang dihindari oleh pemilik perusahaan. Menurut Windaswari & Merkusiwati (2018), hal ini mengakibatkan, *principal* dan *agent* terlibat

konflik kepentingan. Dari penjabaran diatas, diketahui bahwa hipotesis yang diajukan seperti dibawah ini:

H 1: Koneksi politik mempunyai pengaruh positif pada agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajer perusahaan. Hal ini dapat menyelaraskan kepentingan manajer bersama pemegang saham, karena mereka mampu merasakan manfaat maupun risiko langsung yang hadir sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Dari teori keagenan, diketahui bahwa perbedaan kepentingan yang terjalin antara manajer dan pemegang saham menyebabkan masalah keagenan. Rusydi dan Martani (2014) menyatakan bahwa permasalahan keagenan muncul karena pihak pemegang saham ingin kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan sementara manajemen mengharapkan peningkatan kompensasi melalui keuntungan yang tinggi. dengan memaksimalkan kepemilikan saham oleh manajer, permasalahan keagenan mampu diatasi. Kepemilikan saham manajemen akan menyatukan kepentingan manajemen dengan pemegang saham serta memotivasi manajer dalam bertindak sesuai keinginan pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Hartadinata & Tjaraka (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat mendorong keberlangsungan usaha perusahaan dengan tidak mengambil resiko terkait masalah pajak. Dimana permasalahan pajak perusahaan akan menjadikan citra buruk perusahaan dimata masyarakat dan negara, sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa kepemilikan manajerial akan mendesak manajer untuk tidak melaksanakan agresivitas pajak demi mempertahankan usaha. Alkurdi & Mardini (2020) dan Charisma & Dwimulyani (2019) melakukan penelitian sebelumnya tentang hubungan kepemilikan manajerial dengan agresivitas pajak. Temuan mereka menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak, yang menjelaskan bahwa agresivitas pajak menjadi lebih rendah apabila kepemilikan manajerial bernilai tinggi. Merujuk pada penjabaran tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H2: Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif pada agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan jenis pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimanakah pengaruh dari koneksi politik dan kepemilikan manajerial pada agresivitas pajak. Sementara itu, objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang sudah terdaftar di BEI. Kemudian, data penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan tahunan periode 2019-2021 melalui situs resmi yaitu www.idx.co.id.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 yang berjumlah 38 perusahaan. Adapun teknik pengambilan sampel tersebut dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria berikut:

Tabel 1
Tahapan Seleksi Sampel

No	kriteria	jumlah
	populasi	78
1	Selama periode 2019-2021, perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan dan tidak memberikan laporan keuangan yang sebelumnya diauditkan oleh pihak auditor	(12)
2	Selama periode 2019-2021, perusahaan terkait sedang mengalami kerugian	(28)
3	Selama periode 2019-2021, perusahaan terdapat data outlier	(11)
	Jumlah perusahaan memenuhi kriteria	27
	Tahun penelitian	3
		tahun
	Data observasi selama 3 tahun x 26 (sampel)	81

Pengertian Operasional dan Pengukuran Variabel Agresivitas pajak (Y)

Agresivitas pajak adalah praktik yang memanipulasi pendapatan kena pajak suatu perusahaan dengan melaksanakan perancah pajak secara legal dan illegal. Sehingga agresivitas pajak dapat diketahui dengan menerapkan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). Dimana pengukuran ETR dilakukan dengan membandingkan beban pajak perusahaan dengan besar pendapatan bersih untuk menjelaskan seberapa baiknya perusahaan mampu mengelola beban pajak. Dibawah ini merupakan rumus ETR (Lubis, Suryani, and Aggraeni 2018):

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Koneksi Politik

Perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan dengan koneksi politik adalah perusahaan dengan pemegang saham terbesar yang meliputi: (a) pihak anggota parlemen, (b) menteri, atau (c) berhubungan dekat dengan partai politik tertentu.

Koneksi politik yang ada di dalam suatu perusahaan akan diberi nilai berdasarkan status dan jabatan. Pemberian skor tersebut merujuk pada hasil penelitian yang diselesaikan oleh Supatmi et al. (2019) dalam (Sutawan and Sisdyani 2022). Dimana pemberian nilai akan dibedakan antara koneksi politik dari pihak yang sedang menjabat dan mantan pejabat. Nilai yang lebih tinggi diberikan kepada perusahaan yang terkoneksi politik. Hal ini tertuju pada hasil pertimbangan koneksi yang diberikan oleh perusahaan yang menjabat jauh lebih tinggi dari pada mantan pejabat sebelumnya. Nilai untuk perusahaan dengan koneksi politik yang menjabat yaitu 2 sampai 9. Pihak dengan koneksi politik yang tidak aktif akan diberikan nilai 1 sampai 8 dan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik dengan nilai 0. Perhitungan diatas merujuk pada hasil pertimbangan dengan tingkat kecondongan indeks koneksi politik dan terdapat perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Tao et al. (2017) menambahkan bahwa indeks koneksi politik yang dimiliki dapat diketahui melalui logaritma natural dengan total nilai koneksi politik perusahaan yang ditambahkan satu poin. Untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut maka dapat dipahami dari rumus berikut ini:

$$\text{Ln (PCI)} = \text{Ln (1+ PCI)}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai saham pihak manajemen yang terlibat dalam penentuan keputusan. Seorang manajer selalu mengontrol dan mengawasi perusahaan dengan begitu teliti, karena manajer perusahaan dengan peran sebagai pemegang saham sehingga dapat merasakan keputusan yang sudah ditentukan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial perusahaan maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan terkait. Dari penjelasan diatas, maka dapat diperjelas bahwasannya seorang manajer mempunyai dua kendali yakni sebagai seorang manajer maupun pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat diketahui dengan rumus dibawah ini:

$$MAN_OW = \frac{\text{Kepemilikan Manajerial}}{\text{Saham Perusahaan}}$$

Teknik Analisis Data

Data penelitian diuji dengan berbantuan program SPSS dengan teknik analisis data adalah statistik deksriptif dan regresi linear berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 PC - \beta_2 MO + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis penelitian ini adalah nilai range, maksimum dan minimum, mean, sum, varians dan standar deviasi. (Ghozali 2018). Dibawah ini merupakan hasil pengujian statistik deskriptif yang dilaksanakan oleh masing-masing instrument penelitian seperti dibawah ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Koneksi Politik (X1)	81	3.4011973820	.0000000000	3.4011973820	83.7040715440	1.033383599309	1.1448845297600	1.311
Kepemilikan Manajerial (X2)	81	.0326293130	.0000000000	.0326293130	.3373795700	.004165179877	.0087521606089	.000
Agresivitas Pajak (Y)	81	.2738912560	.0514646510	.3253559070	18.5047874330	.228454165840	.0413663514190	.002
Valid N (listwise)	81							

Merujuk pada tabel diatas, dapat dipahami bahwa koneksi politik atau *political connection* (X1) memiliki nilai range sebesar 3,4011973820, nilai minimum sebesar 0,0000000000, nilai maksimum sebesar 3,4011973820, nilai sum sebesar 83,7040715440, nilai mean sebesar 1,033383599309, nilai standar deviasi sebesar 1,1448845297600, dan varians sebesar 1,311. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 103,3% perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer periode 2019-2021 yang diteliti memiliki koneksi politik.

Kepemilikan manajerial atau *managerial ownership* (X2) memiliki nilai range sebesar 0,0326293130, nilai minimum sebesar 0,000000000, nilai maksimum sebesar 0,0326293130, nilai sum sebesar 0,3373795700, nilai mean sebesar 0,004165179877, nilai standar deviasi sebesar 0,0087521606089, dan nilai varians sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 0,4% perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer periode 2019-2021 yang diteliti memiliki kepemilikan manajerial.

Agresivitas pajak atau *tax aggressiveness* (Y) memiliki nilai range sebesar 0,2738912560, nilai minimum sebesar 0,0514646510, nilai maksimum sebesar 0,3253559070, nilai sum sebesar 18,5047874330, nilai mean sebesar 0,228454165840, nilai standar deviasi sebesar 0,0413663514190, dan nilai varians sebesar 0,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 22,8% perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer periode 2019-2021 yang diteliti memiliki agresivitas pajak.

Pengujian Hipotesis Analisa Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Analisis regresi linear berganda coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.231	.007		33.861	.000
Koneksi Politik (X1)	.003	.004	.087	.777	.440
Kepemilikan Manajerial (X2)	-1.456	.526	-.308	-2.765	.007

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (Y)

Merujuk pada hasil uji diatas, maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan seperti dibawah ini:

$$Y = a + b_1PC - b_2MO + e$$

$$Y = 0,231 + 0,003X_1 - 1,456X_2 + e$$

Dari model persamaan regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,231, yang berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari variable koneksi politik dan kepemilikan manajerial maka agresivitas pajak bernilai 0,231. Koefisien regresi variabel koneksi politik (X₁) sebesar 0,003. Hal ini berarti adanya pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas politik, apabila nilai koneksi politik meningkat sebesar satu satuan maka agresivitas politik akan meningkat sebesar 0,3% dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (X₂) sebesar -1,456. Hal ini berarti adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas politik, apabila nilai kepemilikan manajerial meningkat sebesar satu satuan maka agresivitas politik akan menurun sebesar 145,6% dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Uji R^2 Model Summary

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.344 ^a	.118	.096	.0393376787264

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial (X2), Koneksi Politik (X1)

Merujuk pada hasil uji diatas dapat dipahami bahwa koefisien R Square bernilai 0,118. Hal demikian ini berarti bahwa variabel independen penelitian ini memberikan pengaruh pada variabel dependen penelitian sebesar 11.8 %. Sementara itu sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Uji Statistik (F Test)

Tabel 5
Uji F Test ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.016	2	.008	5.232	.007 ^b
	Residual	.121	78	.002		
	Total	.137	80			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial (X2), Koneksi Politik (X1)

Merujuk pada hasil uji diatas dapat dipahami bahwa F bernilai $5,232 < F$ tabel yang bernilai 3,96. Sementara itu, signifikansi bernilai $0,007 > 0,05$. Hal demikian ini menjelaskan bahwa koneksi politik dengan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh pada agresivitas pajak.

Uji Statistik T (T Test)

Tabel 6
Uji T Test Coefficient^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.231	.007		33.861	.000
	Koneksi Politik (X1)	.003	.004	.087	.777	.440
	Kepemilikan Manajerial (X2)	-1.456	.526	-.308	-2.765	.007

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak (Y)

Merujuk pada hasil uji diatas, maka dapat dipahami bahwa nilai signifikansi variabel koneksi politik sebesar $0,440 > 0,05$ dengan nilai beta (β) sebesar $0,003$ dan nilai mutlak t hitung sebesar $0,777 < t$ tabel ($1,664$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis pertama ditolak. Nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar $0,007 < 0,05$ dengan nilai beta (β) sebesar $-1,456$ dan nilai mutlak t hitung sebesar $2,765 > t$ tabel ($1,664$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis kedua diterima.

Pembahasan

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variabel koneksi politik sebesar $0,440 > 0,05$ dengan nilai beta (β) sebesar $0,003$ dan nilai mutlak t hitung sebesar $0,777 < t$ tabel ($1,664$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis pertama ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa koneksi politik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Peneliti menduga tidak berpengaruhnya koneksi politik terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan sampel pada penelitian ini cenderung tidak agresif terhadap pajak sehingga koneksi politik yang menjadi solusi dari masalah agresivitas pajak menjadi tidak memiliki pengaruh. Ada atau tidaknya koneksi politik yang dimiliki perusahaan tidak menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Keputusan perusahaan untuk tidak agresif terhadap pajak diduga karena tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang berisiko, sehingga perusahaan akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan juga didorong oleh semakin meningkatnya keterbukaan informasi yang menyebabkan fiskus dapat mengakses berbagai informasi wajib pajak (Setyastrini *et al.* 2021).

Kedekatan yang dimiliki oleh perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah sehingga akan meningkatkan citra perusahaan tersebut. Dengan adanya hubungan politik baik yang mempunyai jabatan di lembaga pemerintahan atau pernah mempunyai jabatan tersebut yang dimiliki tidak membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, karena perusahaan tidak akan merusak citra mereka di mata masyarakat. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Lestari and Putri 2017)

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu *et al.* (2017) dan Lestari & Putri (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang artinya semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Kim & Zhang (2016), dan Wicaksono (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan koefisien variabelnya menghasilkan nilai negatif.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial sebesar $0,007 < 0,05$ dengan nilai beta (β) sebesar $-1,456$ dan nilai mutlak t hitung sebesar $2,765 > t$ tabel ($1,664$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang artinya hipotesis kedua diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan menurunkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam *Agency Theory*,

dijelaskan bahwa pihak manajemen (*agent*) di dalam suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pemilik perusahaan (*principle*) sehingga manajemen dituntut untuk mengoptimalkan laba perusahaan yang nantinya akan dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan. Adanya pemisahan hak dan tanggung jawab antara pihak manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) seringkali menimbulkan konflik yang dikenal dengan konflik keagenan. Menurut Jensen and Meckling (1976), kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan di dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, pihak manajemen akan memiliki peran ganda yaitu sebagai *agent* dan *principle*. Hal ini akan membuat pihak manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena apabila keputusan yang diambil salah maka pihak manajemen juga akan ikut menanggung dampak yang timbul baik langsung maupun tidak langsung.

Pihak manajemen pada perusahaan yang terdapat kepemilikan manajerial di dalam komposisi pemegang sahamnya akan cenderung lebih mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan, salah satunya adalah melalui penciptaan laba perusahaan yang tentu saja akan berdampak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, perusahaan yang terdapat kepemilikan saham oleh pihak manajemen (*agent*) di dalam komposisi pemegang sahamnya akan cenderung untuk meningkatkan laba periode berjalan dikarenakan pihak manajemen akan mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung atas prestasinya dan investasinya di dalam perusahaan. Laba periode berjalan yang besar akan berdampak pada pembayaran pajak yang juga besar, artinya dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka akan membuat perusahaan tidak agresif terhadap pajak (Wijaya 2019).

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019) dan Nurwati *et al.* (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian oleh Novitasari (2017) dan Hadi & Mangoting (2014) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel koneksi politik dengan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak khususnya pada perusahaan sektor barang konsumen yang telah terdaftar di BEI periode 1019-2021. Adapun kesimpulan yang dihasilkan seperti dibawah ini: Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Keterbatasan

Merujuk pada hasil penelitian diketahui bahwa peneliti sudah berupaya untuk merancang serta mengembangkan penelitian, namun tentunya masih terdapat sejumlah keterbatasan, dimana variabel penelitian ini mampu mendeskripsikan 11,8 %, sementara itu sisa lainnya dideskripsikan oleh faktor-faktor yang lain yang tidak diteliti. Oleh sebab itu, variabel penelitian belum cukup digunakan untuk mendeskripsikan agresivitas pajak secara menyeluruh.

Saran

Dalam hal ini, peneliti dengan sepenuhnya menyadari bahwa penelitiannya masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya banyak keterbatasan baik dalam segi pengetahuan maupun pengalaman. Bagi peneliti selanjutnya dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer dan diharapkan dapat memperluas

cakupan agar menghasilkan penelitian yang lebih maksimal. Sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan sektor perusahaan lainnya terkait praktik *tax aggressiveness*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, Amneh, and Ghassan H. Mardini. 2020. "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 18(4):795–812. doi: 10.1108/JFRA-01-2020-0001/FULL/XML.
- Atari, Jeane, Azwir Nasir, and Elfi Ilham. 2016. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* 3(1):1137–49.
- Ayu et al. 2017. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 18(3):2028–54.
- Charisma, Rezia Bayu, and Susi Dwimulyani. 2019. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating." *Prosiding Seminar Nasional Pakar* 1–10. doi: 10.25105/pakar.v0i0.4308.
- Faccio, Mara. 2006. "Politically Connected Firms." *American Economic Review* 96(1):369–86. doi: 10.1257/000282806776157704.
- Fisman, Raymond. 2001. "Estimating the Value of Political Connections." *American Economic Review* 91(4):1095–1102. doi: 10.1257/AER.91.4.1095.
- Frank, Mary Margaret, Luann J. Lynch, and Sonja Olhott Rego. 2009. "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting." *Accounting Review* 84(2):467–96. doi: 10.2308/accr.2009.84.2.467.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Junilla, and Yenni Mangoting. 2014. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak." *Tax & Accounting Review* 4(2).
- Hidayati, Widya, and Vera Diyanty. 2018. "Pengaruh Moderasi Koneksi Politik Terhadap Kepemilikan Keluarga Dan Agresivitas Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 22(1):46–60. doi: 10.20885/JAAI.VOL22.ISS1.ART5.
- Iswari, Pipit, Eko Arief Sudaryono, and Wahyu Widarjo. 2019. "Political Connection and Tax Aggressiveness: A Study on the State-Owned Enterprises Registered in Indonesia Stock Exchange." *Journal of International Studies* 12(1):79–92. doi: 10.14254/2071-8330.2019/12-1/5.
- Kim, Chansog, and Liandong Zhang. 2016. "Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness." *Contemporary Accounting Research* 33(1):78–114. doi: 10.1111/1911-3846.12150.
- Lestari, Gusti Ayu Widya, and I. G. A. M. Asri Dwija Putri. 2017. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 18(3):2028–54.
- Lubis, Irsan, Suryani, and Firli Aggraeni. 2018. "The Effect of Managerial Ownership and Debt Policy on Tax Aggressiveness in Manufacturing Companies." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 7(2):211–26.
- Novitasari, Shelly. 2017. "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 4(1):1901–14.
- Nurwati, Husnayetti, and Silvi Reni Cusyana. 2023. "Pengaruh Corporate Governance Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor

- Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2020.” 7(1):89–102. doi: 10.52362/jisamar.v7i1.1007.
- Sarra, Hustna. 2017. “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1(1):63–86. doi: 10.31000/competitive.v1i1.108.
- Sebayang, Rehia Indrayanti Beru. 2019. “Dokumen: Google Lakukan Penghindaran Pajak Rp 327 Triliun.” *CNBC Indonesia*. Retrieved April 1, 2023 (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104214635-4-49236/dokumen-google-lakukan-penghindaran-pajak-rp-327-triliun>).
- Setyastrini, N. L. P., I. Subekti, and A. Prastiwi. 2021. “Corporate Governance and Political Connection towards the Tax Aggressiveness of Manufacturing Companies in Indonesia.” *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 8(1):102–9. doi: 10.21744/irjmis.v0i0.000.
- Sintyawati, Ni Luh Ary, and Rusmala Dewi S. Made. 2018. “Made Rusmala Dewi S 2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia.” *Jurnal Manajemen* 7(2):993–1020.
- Supatmi, T. Sutrisno, Erwin Saraswati, and Bambang Purnomosidhi. 2019. “The Effect of Related Party Transactions on Firm Performance: The Moderating Role of Political Connection in Indonesian Banking.” *Business: Theory and Practice* 20(2003):81–92. doi: 10.3846/BTP.2019.08.
- Sutawan, Made Danartha, and Eka Ardhani Sisdyani. 2022. “Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah Dan Pengungkapan Sustainability Reporting.” *E-Jurnal Akuntansi* 32(8):2047. doi: 10.24843/eja.2022.v32.i08.p07.
- Tania, Lana A. D. I., Drs Ec Sugeng, M. Ak, Amin Tohar, and M. Si. 2018. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016.” *Simki-Economic Vol. 02 No. 01 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748* 02(01).
- Tao, Qizhi, Yicheng Sun, Yingjun Zhu, and Xiaolin Yang. 2017. “Political Connections and Government Subsidies: Evidence from Financially Distressed Firms in China.” <http://dx.doi.org/10.1080/1540496X.2017.1332592> 53(8):1854–68. doi: 10.1080/1540496X.2017.1332592.
- Tinjak, Astika Tamala Br, and Lorina Siregar Sudjiman. 2016. “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021.” 15(1):1–23.
- Wahyudi, Dudi. 2015. “Analisa Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CRS) Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia.” *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke - 2 Ikatan Widyaaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Bnaten* 3–4.
- Wareza, Monica. 2019. “Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?” *CNBC Indonesia*. Retrieved April 1, 2023 (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>).
- Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. 2017. “Koneksi Politik Dan Agresivitas Pajak: Fenomena Di Indonesia.” *Akuntabilitas* 10(1). doi: 10.15408/akt.v10i1.5833.
- Wijaya, Denny. 2019. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak.” *Widyakala Journal* 6(1):55. doi: 10.36262/widyakala.v6i1.147.
- Windaswari, Kadek Ayu, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. “Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Pada

Agresivitas Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 23(3):1980–2008. doi: 10.24843/EJA.2018.V23.I03.P14.

Ying, Tingting, Brian Wright, and Wei Huang. 2016. “Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies Article Information :” *International Journal of Accounting and Information Management*.

Zuber, Jill M., and Debra L. Sanders. 2013. “The Influence of Attraction and Company Values on Aggressive Corporate Tax Decision-Making.” *Journal of Accounting, Ethics and Public Policy* 14(2):259–87. doi: 10.2139/ssrn.2238920.